

BAB I PENDAHULUAN

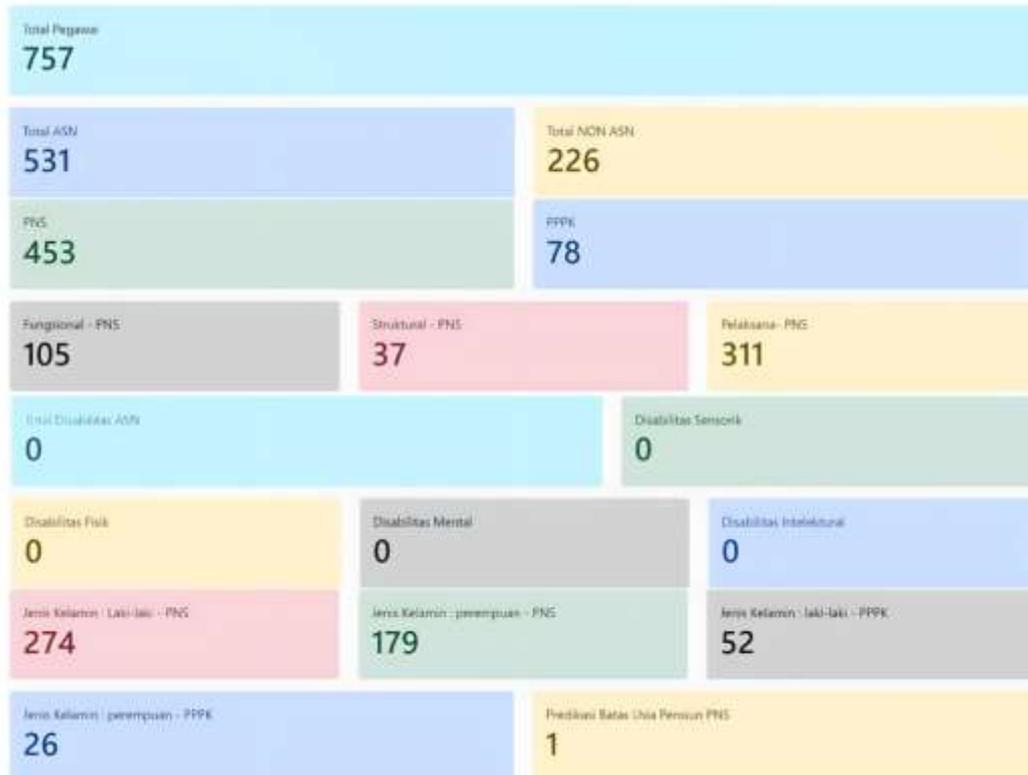
I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini telah mendorong motivasi manusia dalam mengolah data dan informasi. Data dan informasi merupakan aset penting dalam perusahaan atau organisasi apalagi lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan harus dapat mengelola data dengan baik serta memiliki berbagai fungsi seperti perencanaan, pengendalian, dan penyajian. Hal ini berjalan lurus dengan prinsip pemerintah yang berdedikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem di sektor pemerintahan Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*) (Rizky et al., 2023). Dalam hal ini, data menjadi landasan utama untuk mendukung kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah, serta menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan integritas informasi dalam upaya mewujudkan prinsip tersebut (Habibie et al., 2023).

Data yang efektif membutuhkan tata kelola yang kuat, dan tata kelola data telah berkembang menjadi komponen yang sangat penting bagi perusahaan. Melalui praktik tata kelola yang baik, perusahaan dapat dengan mahir menangani berbagai aspek data, termasuk proses pengambilan keputusan dan analisis risiko (Radzi et al., 2021). Oleh sebab itu, manfaat utama dari tata kelola data adalah untuk memenuhi kebutuhan bisnis, menjaga dan mengawasi data sebagai aset perusahaan yang berharga (Payani et al., 2022). Organisasi yang mampu menyajikan data yang berkualitas tinggi menunjukkan transparansi dalam operasional mereka. Pihak eksternal cenderung lebih menghargai organisasi yang terbuka dalam pengelolaan data, yang mendukung prinsip-prinsip *good governance*. Transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga meningkatkan responsibilitas organisasi terhadap publik dan *stakeholder* (Zendrato et al., 2024).

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Pimpinan salah satu biro di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur membawahi kebijakan dan program pembangunan pemerintah, menumbuhkan persepsi positif publik terhadap kepemimpinan pemerintahan, dan membina komunikasi yang

efektif antara pemerintah dan publik. Biro Administrasi Pimpinan bertanggung jawab atas pengelolaan data kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Menurut data statistik kepegawaian dengan keadaan terbaru bulan Juli 2024 di laman <https://bkd.jatimprov.go.id/StatistikPegawai/organisasi/detail/Sekretariat-Daerah>, total pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak 757 orang.



Gambar I.1 Statistik Data Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sumber : Statistik - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan proses bisnis pada dokumen Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nomor 000.8.3.1/212/KPTS/033/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa data yang berkualitas akan meningkatkan pelayanan informasi kepegawaian dan dokumen terkait administrasi kepegawaian. Data kepegawaian merupakan data yang sangat penting bagi organisasi, karena tidak hanya digunakan untuk keperluan administrasi saja, melainkan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan sumber daya manusia, penilaian kinerja, kenaikan jabatan, dan

pemberian gaji serta tunjangan. Data kepegawaian yang ada dalam biro administrasi pimpinan tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi internal, namun juga terintegrasi dengan pihak eksternal seperti Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kominfo, dan Inspektorat untuk dilakukan pemantauan. Melihat adanya pemantauan dari lembaga pemerintahan lain yang terlibat, maka kualitas data kepegawaian ini harus terjaga keabsahannya.

Biro Administrasi Pimpinan memiliki sistem informasi yang dipantau dan terintegrasi oleh pihak eksternal, sistem tersebut yaitu SINOMEN (Sistem Informasi Penomoran Dokumen) yang mempunyai fungsi untuk pemberkasan terkait SK, SPT, dan Nota dinas yang terkait dengan pemberian tunjangan. Kedua, terdapat SMART (Sistem Manajemen ASN Sekretariat Daerah) yang mempunyai fungsi mencetak legalisir online, ID card, dan absensi yang berfungsi sebagai pemberian tunjangan. Ketiga merupakan Jatim Presensi, sebuah aplikasi absensi milik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur yang digunakan oleh seluruh pegawai ASN di Biro Administrasi Pimpinan. Keempat yaitu E-Master, sistem informasi milik Badan Kepegawaian Daerah yang digunakan Biro Administrasi Pimpinan untuk mengelola seluruh data kepegawaian ASN yang ada pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Biro Administrasi Pimpinan masih menghadapi permasalahan seperti tidak terintegrasinya sistem satu sama lainnya, dimana. Hal ini dapat memicu terhambatnya efisiensi operasional karena data tidak dapat dipertukarkan dengan mudah antara sesama sistem, sehingga berpotensi terjadinya duplikasi data, dan kesulitan dalam penyajian data. Permasalahan kedua yaitu penyajian data tidak disajikan secara *real time* seperti *stakeholder* yang kesusahan mengakses data baru dan berakibat dengan perubahan mendadak dalam kebutuhan tenaga kerja atau situasi karyawan tertentu, keterlambatan dalam mendapatkan data yang akurat dapat menghambat respons yang cepat dan tepat. Data yang tidak akurat dapat juga didapatkan dari nilai yang hilang, perhitungan yang salah, dan informasi yang tidak lengkap. Permasalahan tersebut akan berpengaruh pada pihak eksternal juga, misalnya keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan

mempengaruhi kemampuan pihak eksternal untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi.

Penerapan *Framework* DAMA-DMBOKv2 (*Data Management Body Of Knowledge*) dengan menggunakan domain *data quality* diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. *Framework* ini menyediakan pedoman dan *best practice* dalam manajemen data yang mencakup aspek kepegawaian, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, hingga penggunaan data. Domain *data quality* juga memberikan perbaikan bagi organisasi untuk meningkatkan kualitas data nya, karena jika sebuah data buruk akan menimbulkan keterlambatan integrasi serta kerugian yang disebabkan karena kesalahan dalam mengambil keputusan. Dengan menerapkan *framework* dan domain ini, diharapkan Biro Administrasi Pimpinan dapat meningkatkan akurasi dan kelengkapan data kepegawaian, meningkatkan konsistensi data kepegawaian, dan meningkatkan keterintegrasian data kepegawaian antar sistem informasi.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisa dan perancangan domain *data quality management* berdasarkan kerangka kerja DAMA-DMBOKv2?
2. Bagaimana proses dalam melakukan penilaian *data quality management* berdasarkan *model maturity quality data Loshin* terhadap Biro Adminitrasi Pimpinan Provinsi Jawa Timur?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisa dan perancangan berdasarkan kerangka kerja DAMA-DMBOKv2 domain *data quality management*.
2. Melakukan penilaian terhadap kualitas data menggunakan pedoman *data quality management* DAMA-DMBOKv2 dan *model maturity quality data Loshin*.

I.4 Batasan Masalah

Pada bagian batasan masalah ini dibuat agar penelitian ini tidak mencakup luas adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini membatasi diri pada data kepegawaian dan administrasi yang ada pada Biro Administrasi Pimpinan.
2. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja DAMA-DMBOK edisi kedua dan Model kematangan kualitas data Loshin.
3. Penelitian ini difokuskan pada penilaian data menggunakan domain *Data Quality Management*.

I.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberi pemahaman mengenai tata kelola data dan manajemen kualitas data.
2. Mengetahui kondisi *existing* data yang dinilai berdasarkan model kematangan kualitas data Loshin dan kerangka kerja DAMA-DMBOKv2 domain *data quality management*.
3. Mengetahui hasil rekomendasi dan kontribusi usulan terkait tata kelola data manajemen agar dapat mencapai tujuan *good governance*.

I.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja DAMA-DMBOK edisi kedua dengan fokus pada domain *Data Quality*. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan observasional dimana yang digunakan untuk meneliti adalah tempat yang bersifat alamiah. Penelitian ini tidak menerapkan perlakuan yang direncanakan, karena peneliti mengadopsi pendekatan emik dalam pengumpulan data, yang berarti data dikumpulkan berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan atau interpretasi peneliti (Prof. Dr. Sugiyono, 2013). Metode kualitatif yang digunakan yaitu dengan menganalisa penemuan berdasarkan *framework* DAMA-DMBOKv2. Penelitian ini juga berfokus pada model kematangan kualitas data David

Loshin untuk tahap *assessment*. Pada tahap akhir peneliti mengaitkan validasi dan pengesahan kepada *expert judgement*.